



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA
BUKITTINGGI DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA
PADA MASA PANDEMI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16
TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*



Oleh:

**ANNISA MAYUNI
NIM 11720725003**

**HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan”*** yang ditulis oleh:

Nama : ANNISA MAYUNI
 NIM : 11720725003
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021
 Pembimbing Skripsi

Basir, S.HI, MH

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan**, yang ditulis oleh :

Nama : Annisa Mayuni

NIM : 11720725003

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 22 November 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Asril S.HI.,M.H.

Sekretaris

Muslim,S.Ag.,S.H.,M.Hum.

Penguji I

H.Mohd. Kastulani, S.H.,M.H.

Penguji II

Hj. Nur'aini Sahu, S.H.,M.H.



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

DR.H.Zulkifli,M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Disamping mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis, penyalinan atau penjiplakan merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANNISA MAYUHI
 NIM : 11720725003
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 03/07/1998
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



ANNISA MAYUHI
 NIM : 11720725003

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Annisa Mayuni (2021) : “Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan”.

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh diaturnya pelaksanaan pelatihan kerja dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dalam peraturan ini Menteri Ketenagakerjaan membuat program pelatihan kerja yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan yang mana pelatihan kerja ini dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan pelatihan kerja sebagai program kerja yang penting dan wajib dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa peran Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan kerja dalam masa pandemi, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan kerja dalam masa pandemi, bagaimana proses pelaksanaan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan langsung di lapangan, sumber yang dipakai berupa sumber data primer yaitu wawancara langsung, sumber data sekunder yaitu buku buku yang berkaitan dengan pelatihan kerja, sumber data tersier yaitu kamus, pembahasan dan analisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

Hasil penelitian ini adalah bahwa Dinas ketenagakerjaan sangat berperan penting dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi, pelatihan kerja yang dilaksanakan tidak sebanyak yang dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu melaksanakan dua macam pelatihan kerja, Pelatihan kerja yang dilakukan yaitu pelatihan kerja tata boga dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kerja ini bisa dilakukan di luar program tergantung masyarakat yang mengajukan. Pelaksanaan pelatihan kerja pada tahun ini dilakukan berdasarkan protokol kesehatan covid19, jumlah anggota pelatihan dibatasi karena dikurangnya anggrana untuk kepentingan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid19. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja ini adalah kurang luasnya fasilitas yang akan digunakan sebagai ruang pelatihan kerja sehingga untuk melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan protokol covid19 sangat berpengaruh.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **‘Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan’**”.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Syafri dan Ibunda Nilawati tercinta yang telah memberikan doa, nasehat, serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti hentinya, selanjutnya kakanda Faisal Amir, Eva Puspita Sari, Wendy Yulianto,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Wenny Yulianti dan Muhammad Yuri, yang telah memberikan semangat dan doa agar skripsi ini selesai dengan baik.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor dan Ibu Dr.Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak DR.H. Zulkifli,M.Ag, serta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, MCL dan wakil Dekan II Dr.H,Mawardi,S.Ag.,M.Si sekaligus Wakil Dekan III Dr.Sofia Hardani, M.Ag.
4. Yang terhormat Bapak Asril SHI,MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr.Muhammad Alpi Syahrin, SH.,MH selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
5. Yang terhormat Bapak Basir, S.HI, MH Selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih Kepada Bapak Ilham Akbar, SH, MH selaku Penasehat Akademik
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
8. Yang terhormat, Kepala Dinas Bapak Sizal.,ST beserta para staff Dinas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian dan TenagaKerja Kota Bukittinggi, yang berkenaan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Besty Diana, S.H, Nurvannisa Fajrimustika, S.H, Nurjannah, Lissa Fahlepi, S.E, Rizda Fauziah, A,Md.Si, Sipa Agesti, Felin Putr Rizky, Febi Yulianti dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 12 Februari 2021
Penulis,

ANNISA MAYUNI
NIM. 11720725003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	15
A. Sejarah singkat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian Dan TenagaKerja Kota bukittinggi	15
B. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan TenagaKerja Kota Bukittinggi	17
C. Program Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan TenagaKerja Kota Bukittinggi	19
D. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan TenagaKerja Kota Bukittinggi	20
E. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan TenagaKerja Kota Bukittinggi	21
F. Tugas dan fungsi Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan TenagaKerja Kota Bukittinggi	22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN TEORITIS	56
A.	Peran	56
1.	Pengertian Peran	56
2.	Tujuan Peran	57
B.	Hukum Tenagakerja	57
1.	Pengertian Ketenagakerjaan	57
2.	Hukum Ketenagakerjaan	59
3.	Kontrak Ketenagakerjaan	60
4.	Perjanjian Kerja	62
C.	Pelatihan Kerja	63
1.	Pengertian pelatihan kerja	63
2.	Manfaat pelatihan kerja	65
3.	Tujuan pelatihan kerja	66
D.	Pelatihan kerja berdasarkan undang undang	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A.	Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020	68
B.	Kendala dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020	79
BAB V	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dpmtsp Kota Bukittinggi	21
------------	---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk banyak. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja untuk membantu pemerintah. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi di negara ini berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan kerja atau mencari nafkah bagi tenaga kerja tidak sedikit. Salah satu Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang besar sehingga banyaknya pengangguran dan pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata.

Sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan daya saing yang tinggi salah satu cara untuk mengambil keuntungan dari globalisasi manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya dengan cara bekerja. Hubungan pekerjaan dan kerja sama yang baik antara pemerintah, industri pendidikan harus diarahkan untuk mengikat daya saing SDM.¹

¹ Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ,(Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2003), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehingga Pemerintah harus mengembangkan sistem yang dapat menjamin kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat dalam akses pendidikan yang berkualitas, teknologi yang memadai dan kemudahan investasi sehingga dapat membuka lapangan kerja. Sedangkan industri memiliki peran penting dalam kesempatan dan pelatihan kerja on-the-job training bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi atau kerja sama pemerintah, industri pendidikan tentang pelatihan kerja masyarakat dan industri, diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pelatihan kerja sehingga dapat bersaing di Era globalisasi.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang terus menerus menjadi masalah berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk menyerap pertambahan tenaga kerja yang cukup besar dan meningkat cukup tinggi setiap tahunnya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja²

Untuk itu pemerintah membentuk dinas yang diperuntukan untuk mengatur segala urusan tentang tenagakerja yang disebut dengan Disnaker (Dinas Tenagakerja). Yang mana mempunyai tugas dan fungsi pokok Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan dibidang penempatan dan perluasan kerja, dibidang pelatihan dan produktivitas, dibidang hubungan industrial dan syarat kerja, di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja.

² Nona Widyana, "Program Pelatihan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2015", JOM FISIP, Vol. 3 Nomor2 – Oktober 2016 , h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permasalahan yang ada dalam tenaga kerja Indonesia saat ini memang tidak dapat dihindari. Namun, permasalahan itu bukan menjadi alasan untuk menghentikan persaingan. Justru sebaliknya, Indonesia harus melihat peluang yang terbuka untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada dengan meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan memberikan edukasi. Tidak sedikit upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran termasuk pelatihan oleh dinas ketenagakerjaan dan kartu pra kerja. Kartu pra kerja sendiri dikeluarkan untuk meredam dampak ekonomi, kartu pra kerja ini sendiri berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Para pekerja yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja dan pekerja atau buruh yang membutuhkan dukungan *finansial*. Kartu prakerja memberikan bantuan finansial sebesar Rp 3.550.000, yang mana uang untuk melakukan pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif pascapelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulannya, dan insentif survei sebesar 50.000 untuk 3 kali pelatihan. Untuk mendapatkan kartu pra kerja bagi masyarakat yang akan mendaftarkan diri harus memiliki persyaratan yaitu, warga negara Indonesia yang berumur 18 tahun, tidak mengenyam pendidikan formal, pencari kerja, korban PHK, dan wirausaha, Bukan anggota TNI/Polri, ASN, anggota DPR/DPRD, BUMN/BUMD, kepala desa dan perangkat desa, ataupun pejabat BUMN/BUMD. Kartu pra kerja bertujuan untuk memberikan pelatihan vokasi yakni *skilling*, *up-skilling* dan *re-skilling* serta sertifikasi kompetensi kerja. Pelatihan vokasi ini diberikan oleh tenaga ahli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengatur permasalahan ketenagakerjaan pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan. yang berisikan alat ukur untuk kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mana peraturan ini juga dipakai oleh Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program kerjanya termasuk alat ukur dalam terlaksananya pelatihan kerja yang menjadi fungsi dari Dinas Tenaga Kerja.

Program pelatihan kerja merupakan langkah yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam menghasilkan tenaga kerja yang bisa bersaing didalam era globalisasi, Program Pelatihan Tenaga Kerja ini menjadi kegiatan rutin Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Bukittinggi setiap tahun.

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sangat baik ini, kualitas SDM masih perlu diperbaiki lagi. Tenaga kerja yang ada Indonesia tidak bisa hanya bekerja sebagai tenaga kerja informal karena kualitas yang belum memadai. Dalam hal ini, pemerintah sangat berpengaruh sangat besar untuk mendorong kemajuan kualitas itu. Dalam masa pandemi banyak masalah-masalah yang ditimbulkan seperti tidak adanya lapangan pekerjaan karena pemasukan yang sedikit dan susahny mendapatkan pekerjaan karena ditutupnya tempat usaha. Untuk memiliki peluang yang besar tenaga kerja perlu peningkatan kualitas kerjanya agar bisa bersaing dalam masa pandemi seperti ini. Tenaga kerja lebih dibutuhkan apabila mereka punya kualitas sebagai pekerja yang tinggi dan hal ini menjadi faktor utama di pakainya seseorang sebagai tenaga kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di masa pandemi Covid-19 ini adanya pembatasan proses belajar mengajar tatap muka di zona hijau, pemerintah pun peduli terhadap pendidikan vokasi dengan menyiapkan pembukaan lembaga kursus dan pelatihan untuk mendukung program vokasi (keterampilan). Pemerintah tetap berusaha agar pelatihan tetap berjalan walaupun dalam masa pandemi. Pemerintah membatasi daerah-daerah yang boleh menggelar pelatihan kerja, bahwa daerah dalam zona hijau dipersilahkan membuka dengan syarat minimal usia pelatihan adalah 15 tahun. Sedangkan, diluar dari zona hijau akan dilaksanakan pelatihan dan kursus dengan metode daring.

Diluar zona hijau juga harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas penanganan Covid-19 di daerah setempat. Protokol kesehatan dalam pelatihan secara tatap muka akan dilakukan secara ketat antara lain peserta wajib menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, penyelenggaraan pelatihan juga wajib menyediakan tempat cuci tangan, dan wajib menerapkan etika batuk/bersin.

Dalam masa pandemi ini ada empat tantangan dalam pelaksanaan pelatihan secara daring. Pertama, peserta pelatihan yang pasif. Peserta pasif akan menyulitkan instruktur/*trainer* untuk mengetahui apakah peserta mengerti atau tidak terhadap materi yang diberikan. "Solusinya, *trainer*/instruktur harus dapat membaca situasi dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang interaktif. Kedua, *trainer* harus terus terhubung dengan peserta. Sebab saat instruktur/*trainer* memberikan pelatihan daring, sering kali peserta mengalami "gangguan" dari lingkungan di sekitarnya. Tantangan ketiga Kecepatan internet yang sering naik turun atau "*blank spot*" di beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

daerah menyebabkan hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan daring. Tantangan keempat yakni infrastruktur jaringan internet. Sebagai negara berkembang, infrastruktur untuk jaringan internet di Indonesia masih menjadi tantangan karena belum semua daerah di Indonesia telah ter-cover jaringan internet yang memadai.

Dengan adanya revitalisasi kursus dan pelatihan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang menjadi fokus Pemerintah saat ini dan mampu menyerap tenaga kerja jangka pendek. Meskipun pandemi virus corona sedang melanda Indonesia yang mengakibatkan kita “hidup bersama” dengan virus corona, produktifitas para pekerja harus tetap dijaga melalui program pelatihan yang kontinue untuk tetap menjaga daya saing dan keunggulan kompetitif pekerja.³

Hal ini lah yang melatarbelakangi kenapa saya mengangkat judul **Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020**, judul ini saya angkat tidak lain untuk meneliti apa saja peran dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi agar tenaga kerjanya bisa di pakai pada masa pandemi dikarenakan kualitasnya yang tinggi

³ Gugus wijanarko “perancangan prograam pelatihan karyawan dalam rangka mendukung produktifitas karyawan dimasa pandemi covid 19”, STIAMAK STIE IBMT, Vol. 17 Nomor1 – Oktober 2020 , h. 10.

B. Batasan Masalah

Karena luasnya daerah Sumatera Barat dan banyaknya Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan kerja maka penulis akan membatasi dan menfokuskan masalah penelitian ini di Kota Bukittinggi yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan kerja dalam masa pandemi
 - b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pelatihan kerja dalam masa pandemi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

2. Manfaat Penelitian :⁴

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1)
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum.
- c. Bagi Dinas Tenagakerja Penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota bukittinggi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kinerjanya.

Metedologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵ Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

⁵ Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, Cet. Ke-1, 2015), h.7-9.

⁶ HB Satopo, *Medote Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999),h.89.

bersifat logis.⁷ untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bukittinggi dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena di Kota Bukittinggi masih banyak masyarakat sebagai tenaga kerja pemula masih kurang terlatih dan tidak memanfaatkan pelatihan kerja yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study kasus. Sedangkan sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2011), h.122.

⁸ Hajar, Op.cit., h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive sampling. Purposive sampling yaitu suatu teknik adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kabid Ketenagakerjaan	1 orang	1 orang	100%
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Kepegawaian	1 orang	1 orang	100%
3	Seksi Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 orang	1 orang	100%
4	Seksi Pelaksanaan Pelatihan Kerja	1 orang	1 orang	100%
5	Anggota Pelatihan	32 orang	5 orang	16%

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan data tersier :

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).⁹
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁰

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h.156.

¹⁰ HB Satopo, *Op.cit.*, ,h.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data tersier adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dan diperlukan antara lain :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) meliputi “kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera”. Dalam konsep ini, peneliti memaknai bahwa observasi dimaksudkan sebagai pengamatan langsung ke lapangan yang terstruktur dan dilakukan dengan menggunakan media penunjang seperti kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara ataupun pedoman pengamatan.¹²

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai”. Adapun jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur (tertutup) dan tidak terstruktur (terbuka).

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 42

¹² Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Metode Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai referensi terkait penelitian dengan tema yang sejenis dengan topik penelitian.¹³

F. Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹⁴

Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.

¹³ Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*,(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011),h.53.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,cet.ke-3 (Jakarta: UI Press,2007), h.24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Data yang disajikan berbentuk data maupun dalam bentuk narasikemudian mendapatkan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan pelatihan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan dari skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digambarkan lokasi penelitian Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan tentang tahap tahap pelaksanaan pelatihan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Membahas peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Buikittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi.
- B. Membahas kendala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian Dan Tenagakerja Kota bukittinggi

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan Apapun Dalam Dunia Usaha Sekarang Ini. Izin Juga Merupakan Salah Satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat.¹⁵

Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.

Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa izin digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, seleksi orang dan atau aktifitas tertentu. Maka dari itu, jelas sekali banyak hal yang dikemukakan oleh perizinan sehingga dapat

¹⁵ Arsip Dokumen Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Terpadu Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi, h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terlaksana aktifitas yang hendak dilakukan. Contohnya seperti izin pada bidang kesehatan. Tanpa adanya izin, dokter, perawat, apoteker, dan petugas kesehatan lainnya mudah untuk melakukan malpraktik. Sehingga akan banyak masyarakat yang tidak akan mempercayai dokter atau petugas kesehatan lainnya untuk melakukan pengobatan. Akhirnya masyarakat tidak akan mendapatkan jaminan kesehatannya lagi untuk melakukan pengobatan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki izin dalam segala tindakan atau kegiatan.

Untuk mendapatkan izin, perlu adanya surat izin yang menandakan kebolehan atau sertifikasi maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat izin tersebut. Pihak yang berwenang menerbitkan izin adalah bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja yang salah satunya berada di Kota Bukittinggi. Dinas ini terdapat di berbagai daerah di Indonesia yang beberapa diantaranya memiliki tambahan nama tersendiri sesuai dengan Peraturan Daerah.¹⁶

Di Kota Bukittinggi dinas ini dinamakan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK) yang berlokasi di Jalan Perwira Nomor 33, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Sebelum tahun 2014 dinas ini hanya berfokus pada proses pelayanan sehingga dinamakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun, setelah tahun 2014 karena adanya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan

¹⁶ *Ibid*,h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dimana aturan tersebut mendorong agar semua Pemerintah Daerah untuk mempercepat penggabungan kedua urusan tersebut ke dalam satu kesatuan wadah kelembagaan kantor ini kemudian dinamakan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diubah namanya dengan tambahan bidang tenaga kerja yang dahulunya merupakan bagian dari Dinas Sosial dan bidang perindustrian yang dahulunya merupakan bagian dari Dinas Koperasi, Pasar, dan Perdagangan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan kantor dinas yang berperan membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian, dan tenaga kerja di wilayah Kota Bukittinggi.¹⁷

B. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan Tenagakerja Kota Bukittinggi

1. Visi

“Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Utama Investasi di Wilayah Sumatera Yang Berdaya Saing Tinggi dan

¹⁷ *Ibid*, h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paling Kooperatif serta Paling Menarik Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dan Berkeadilan”.¹⁸

Provinsi Sumatera Barat akan menjadi tujuan utama dan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dalam arti suasana dan lingkungan yang kondusif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi. Yang dimaksud dengan iklim kondusif meliputi aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya memberi kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat, melalui upaya-upaya pemberdayaan seluruh *stakeholders*, sehingga Sumatera Barat menjadi daerah yang paling mudah bagi investor untuk menanamkan modalnya. Filosofinya adalah mudah, cepat, murah dan adanya jaminan kepastian hukum. Upaya terus menerus memperbaiki infrastruktur dan pelayanan akan menjadikan Penanaman Modal di Sumatera Barat menjadi yang paling menarik dibanding daerah-daerah lain. Filosofinya adalah tanpa gangguan, tidak ada demonstrasi anarkis, pelayanan paripurna, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*).

2. Misi

- a. Meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menunjang untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah-satu tujuan utama penanaman modal di wilayah Sumatera dan Indonesia tahun 2032.

¹⁸*Ibid*, h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai persepsi para *stakeholders* penanaman modal bagi upaya mempercepat pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2032.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang kooperatif bagi penanaman modal di wilayah Sumatera tahun 2032.
- d. Mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain kemenarikan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah paling menarik bagi penanaman modal di wilayah Sumatera tahun 2032.¹⁹

C. Program Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
4. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
6. Peningkatan Kesempatan Kerja.
7. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
8. Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan.
9. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

¹⁹ *Ibid*, h. 105

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
12. Program Penataan Struktur Industri.
13. Program Pengembangan Sentra-sentra Potensial ²⁰

D. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Tugasnya yaitu Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu serta Industri dan Tenaga Kerja²¹

Fungsinya yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal,
2. Pelayanan Perizinan Terpadu
3. Perindustrian dan Tenaga Kerja
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal
5. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
6. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

²⁰ *Ibid*, h. 106

²¹ *Ibid*, h. 107.

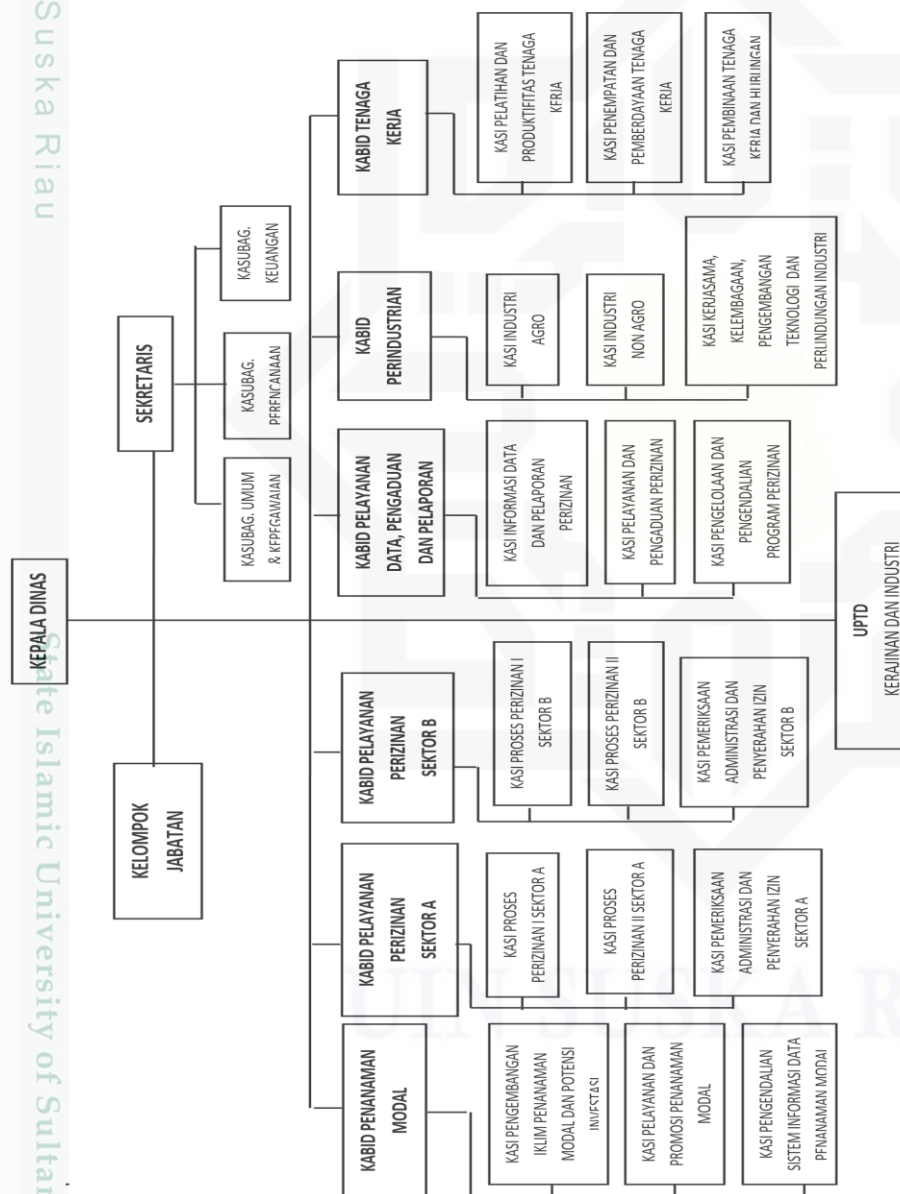
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan Tenagakerja Kota Bukittinggi

Setiap lembaga dinas tentu mempunyai struktur organisasi tertentu,

Adapun struktur organisasinya :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dpmptsp Kota Bukittinggi



F. Tugas dan fungsi Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Perindustrian Dan Tenagakerja Kota Bukittinggi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.²² Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut tugas dan fungsi secara rinci berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi²³:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal,

²² https://dpmptsptk.bukittinggikota.go.id/profile/pages/struktur_organisasi diakses tanggal 17 Juli 2021

²³ *Op.cit.h.18*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perizinan, perindustrian dan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Terpadu menyelenggarakan fungsi²⁴ :

- a. Perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian,

²⁴ Ibid, h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah dilingkup Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Adapun rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut²⁵ :

- a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;

²⁵ Ibid, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan. Perpustakaan, komunikasi, pengetikan atau penggandaan atau pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- g) Pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subag Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Rincian tugas menyelenggarakan fungsi sub bagian perencanaan adalah sbb:

- a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
- b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;
 - e) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f) Pelaksanaan penyusunan renstra, kerja, rencana kegiatan dan anggaran, dan laporan kinerja Dinas; dan
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.²⁶
- 3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- b) Pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas;
- c) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- d) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;

²⁶ Ibid, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas;
- f) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal yang dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program statistik, pendataan dan cpelaporan dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisa data dasar untuk perencanaan teknis pelaksanaan penanaman modal dalam peningkatan potensi investasi daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi²⁷ :

- a. Perumusan, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanaman modal;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasikan penyusunan kebijakan tek Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal sesuai bidang urusan/ kewenangan pemerintah daerah;
- c. Merumuskan, melaksanakan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;

²⁷ Ibid, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pengembangan iklim perencanaan penanaman modal, promosi, informasi dan pelaksanaan penanaman modal/investasi;
- f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang penanaman modal sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- g. Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang penelitian, pengawasan dan informasi pengaduan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.²⁸

- a. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi

Seksi pengembangan iklim penanaman modal dan potensi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan iklim penanaman modal dan potensi investasi dalam arti melakukan pengumpulan data dan analisis penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta penyusunan dokumen perencanaan pelayanan investasi jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang partisipatif. Dalam melaksanakan tugas seksi

²⁸ Ibid, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan iklim, penanaman modal dan potensi investasi menyelenggarakan fungsi²⁹ :

- 1) Penyusunan program kerja seksi pengembangan iklim, penanaman modal dan potensi investasi sesuai program kerja bidang penanaman modal;
- 2) Penyiapan konsep kerjasama perjanjian bidang penanaman modal/promosi Daerah;
- 3) Penyiapan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pelayanan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian informasi;
- 4) Perumusan dan penyiapan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan dalam pengembangan pelayanan investasi;
- 5) Penginventarisiran peluang investasi baik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap swasta yang akan melakukan investasi;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas ; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

²⁹ Ibid, h. 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Seksi Pelayanan dan promosi Penanaman Modal

Seksi pelayanan dan promosi penanaman modal mempunyai tugas menyelenggarakan program bidang pelayanan promosi penanaman modal dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan kegiatan promosi investasi di dalam maupun di luar negeri serta sarana dan prasarana berdasarkan sektor usaha. Dalam melaksanakan tugas seksi pelayanan dan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi³⁰;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan dan promosi penanaman modal sesuai program kerja bidang penanaman modal
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan dan promosi penanaman modal
- 3) Penyusunan bahan pelayanan dan promosi penanaman modal;
- 4) Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/prioritas;
- 5) Penyiapan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
- 6) Penyusunan bahan pelayanan dan promosi penanaman modal;
- 7) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

³⁰ Ibid, h 26

c. Seksi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal

Seksi pengendalian sistem informasi data penanaman modal mempunyai tugas menyelenggarakan sistem informasi data penanaman modal dalam arti melakukan pengumpulan, mempersiapkan dan mengendalikan sistim informasi data untuk investasi penanaman modal serta pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas seksi pengendalian sistem informasi data penanaman modal menyelenggarakan fungsi³¹:

- 1) Penyusunan program kerja seksi pengendalian sistem informasi data penanaman modal sesuai program kerja bidang penanaman modal;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sistem informasi data penanaman modal;
- 3) Penyusunan profil-profil penanaman modal sebagai penarik investor bidang usaha unggulan/prioritas Daerah;
- 4) Penyusunan peta investasi daerah dan indentifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah;
- 5) Pelaksanaan memutakhirkan data dan informasi penanaman modal Daerah;

³¹ Ibid, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan Perizinan Sektor A

Bidang pelayanan perizinan sektor A dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan rencana kegiatan dalam arti mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi bentuk dan proses pelayanan perizinan yang meliputi; sektor penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, pendidikan, kesehatan dan peternakan sesuai urusan/ kewenangan pemerintahan bidang perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.³² Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sektor A menyelenggarakan fungsi³³ :

- a. Penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan sektor A;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan perizinan sektor A;
- c. Penyelenggaraan dan koordinasi proses pelayanan perizinan sesuai wilayah sektor A pelayanan perizinan;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan perizinan sektor A sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;

³² *Ibid*, h. 29

³³ *Ibid*, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan proses perizinan dalam bentuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP);
- f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggarakan kerjasama bidang pelayanan perizinan sektor A sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan sektor A; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Seksi Proses Perizinan I Sektor A Seksi proses perizinan I sektor A mempunyai tugas menyelenggarakan , memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan serta melakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan perizinan I sektor A meliputi penanaman modal, perindustrian, koperasi dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan I sektor A menyelenggarakan fungsi³⁴;

- a. Penyusunan program kerja seksi proses perizinan I sektor A sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor A;
- b. Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan sesuai wilayah sektor;

³⁴ Ibid, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan I sektor A serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan I sektor A yang telah diproses tim teknis;
- e. Penerbitan surat ijin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan I sektor A;
- f. Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan I sektor A yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan;
- g. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan I sektor A; dan 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Proses Perizinan II Sektor A Seksi proses perizinan II sektor A mempunyai tugas menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan II sektor A serta melakukan pemrosesan penerbitan sektor A meliputi kesehatan, pendidikan, peternakan serta sektor energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan II sektor A menyelenggarakan fungsi³⁵;

- a. Penyusunan program kerja seksi proses perizinan II sektor A sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor II sektor A;

³⁵ Ibid, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan II sektor A sesuai wilayah sektor;
- c. Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan II sektor A serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan II sektor A yang telah diproses tim teknis;
- e. Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan II sektor A;
- f. Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan II sektor A yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan II sektor A;
- g. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan II sektor A; dan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. c. Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A Seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A mempunyai tugas menyelenggarakan, pemeriksaan bahan izin dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan Sektor A serta melakukan pemeriksaan berkas izin, pendistribusian dokumen izin untuk dilakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah sektor A meliputi sektor penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, pendidikan, kesehatan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A menyelenggarakan fungsi³⁶ :

- 1) Penyusunan program kerja seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor A;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A;
- 3) Penyusunan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor A;
- 4) Penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu perizinan oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- 5) Melakukan verifikasi persyaratan kelengkapan perizinan permohonan yang masuk oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK dan diteruskan pada seksi sesuai sektor untuk proses lebih lanjut;
- 6) Penyerahan surat izin yang telah diterbitkan kepada pemohon oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- 7) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan sektor A yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data,

³⁶ Ibid, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan sektor A; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pelayanan Perizinan Sektor B

Bidang pelayanan perizinan sektor B dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan rencana kegiatan dalam arti mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi bentuk dan proses pelayanan perizinan yang meliputi³⁷; sektor prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan, sesuai urusan/wewenangan pemerintahan bidang perizinan sektor B dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menyelenggarakan tugas bidang pelayanan perizinan sektor B menyelenggarakan fungsi;³⁸

- a. Penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan sektor B;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan perizinan sektor B;
- c. Penyelenggaraan dan koordinasi proses pelayanan perizinan sesuai wilayah sektor B;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pelayanan perizinan sektor B sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;

³⁷ *Ibid*, h. 37

³⁸ *Ibid*, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan proses perizinan sektor B dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggarakan kerjasama bidang pelayanan perizinan sektor B sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan sektor B;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Proses Perizinan I Sektor B

Seksi proses perizinan I sektor B mempunyai tugas menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan sektor B serta melakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan perizinan I sektor B meliputi prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, perhubungan, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan I sektor B menyelenggarakan fungsi;³⁹

- 1) Penyusunan program kerja seksi proses perizinan I sektor B sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan I sektor B;
- 2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi sesuai wilayah perizinan I sektor B;

³⁹ Ibid, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan I sektor B serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - 4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan I sektor B yang telah diproses tim teknis;
 - 5) Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan I sektor B;
 - 6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan I sektor B yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan;
 - 7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan I sektor B; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Proses Perizinan II sektor B

Seksi proses perizinan II sektor B mempunyai tugas menyelenggarakan, memproses dalam arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan II sektor B serta melakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah pelayanan perizinan II sektor B meliputi tenaga kerja, pariwisata dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugas seksi proses perizinan II sektor B menyelenggarakan fungsi;⁴⁰

⁴⁰ Ibid, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan dan proses perizinan II sektor B sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor B;
 - 2) Penghimpunan, pengumpulan dan pemrosesan izin serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi perizinan sesuai wilayah sektor;
 - 3) Penginventarisiran permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan proses izin terkait administrasi perizinan II sektor B serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - 4) Pelaksanaan verifikasi persyaratan perizinan II sektor B yang telah diproses tim teknis;
 - 5) Penerbitan surat izin yang telah diverifikasi kelengkapannya sebagai berkas administrasi perizinan II sektor B;
 - 6) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan II sektor B yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan II sektor B;
 - 7) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan II sektor B; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B
- Seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B mempunyai tugas menyelenggarakan pemeriksaan bahan izin dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arti mengkoordinir penyusunan dokumen administrasi perizinan sektor B serta melakukan pemeriksaan berkas izin, pendistribusian dokumen izin untuk dilakukan pemrosesan penerbitan izin yang masuk dalam wilayah sektor B meliputi sektor prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman, pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B menyelenggarakan fungsi;⁴¹

- 1) Penyusunan program kerja seksi pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sesuai dengan program kerja bidang pelayanan perizinan sektor B;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B;
- 3) Penyusunan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan pemeriksaan administrasi dan penyerahan izin sektor B;
- 4) Penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan perizinan oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- 5) Melakukan verifikasi persyaratan kelengkapan perizinan permohonan yang masuk oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK dan diteruskan pada seksi sesuai sektor untuk proses lebih lanjut;

⁴¹ Ibid, h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penyerahan surat izin yang telah diterbitkan kepada pemohon oleh front office (FO) Dinas PMPTSPPTK;
- 7) Pelaksanaan penyerahan berkas kerja perizinan sektor B yang telah diterbitkan berbentuk dokumen pada bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan sebagai tindak lanjut laporan perizinan sektor B; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. b

6. Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan

Bidang Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan dalam arti penyusunan rencana dan program kerja dalam memberikan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program serta sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku; Dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan, pelaksanaan dan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi dokumen perizinan dan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pelayanan data, informasi penanganan pengaduan dan pelaporan dan kebijakan kajian program sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- f. Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang penelitian, pengawasan dan informasi pengaduan; dan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- a. Seksi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan

Seksi informasi data dan pelaporan perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan program evaluasi dan penyusunan pelaporan dan penyelamatan berkas perizinan sebagai dokumen terhadap pelaksanaan program dinas yang meliputi pelayanan perizinan yang dikeluarkan pada Dinas. Dalam melaksanakan tugas seksi informasi data dan pelaporan perizinan menyelenggarakan fungsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan program kerja seksi informasi data dan pelaporan perizinan sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan informasi data dan pelaporan perizinan;
- 3) Penyusunan bahan pengembangan informasi data dan pelaporan perizinan;
- 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data bidang informasi evaluasi dan pelaporan perizinan;
- 5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi informasi data dan pelaporan perizinan; dan. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.⁴²

b. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan Seksi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi perizinan yang telah dikeluarkan, merumuskan penanganan terkait informasi pengaduan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan; Dalam melaksanakan tugas seksi pelayanan pengaduan perizinan menyelenggarakan fungsi ;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelayanan pengaduan perizinan sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan;

⁴² Ibid, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyusunan data,dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan pengaduan perizinan;
- 3) Penyusunan bahan pengembangan dan pendataan pelayanan pengaduan perizinan;
- 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang pelayanan pengaduan perizinan;
- 5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi pelayanan pengaduan perizinan; dan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan

Seksi Pengelolaan dan pengendalian program perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, pengamanan dan pengembangan sistem aplikasi perizinan, merumuskan halhal yang terkait dengan informasi perizinan serta pengendalian program dalam pengelolaan aplikasi perizinan. Dalam melaksanakan tugas seksi pengelolaan dan pengendalian program perizinan menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi kebijakan dan pengendalian program sesuai dengan program kerja bidang pelayanan data, pengaduan dan pelaporan;
- 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian program perizinan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan manajemen pengembangan jaringan sistem aplikasi perizinan online;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaksanaan pengelolaan penataan sistem pengamanan perangkat lunak (software) aplikasi perizinan;
- 5) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi pengelolaan dan pengendalian program perizinan; dan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam arti penyusunan rencana dan program pelayanan data perindustrian sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi;⁴³

- a. Perumusan, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan dan data perindustrian;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program perindustrian sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi perindustrian dan pelayanan, sarana prasarana dan perlindungan industri;
- d. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan dan pengembangan perindustrian;

⁴³ *Ibid*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyusunan kebijakan teknis mutu dan pemasaran perindustrian, kualitas produksi industri, pengkajian pengendalian mutu dan pemasaran industri;
- f. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggarakan kerjasama bidang perindustrian sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- g. Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis program kerjasama kelembagaan dan pengembangan teknologi;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Industri Agro

Seksi industri agro mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang industri agro dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan usaha, fasilitasi sarana prasarana pemasaran/promosi terhadap usaha bidang industri agro untuk meningkatkan kemahiran pekerja dalam melaksanakan produktivitas. Dalam melaksanakan tugas seksi industri agro menyelenggarakan fungsi;⁴⁴

- 1) Penyusunan program kerja seksi industri agro sesuai dengan program kerja bidang perindustrian;

⁴⁴ *Ibid*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang industri agro terkait kajian mutu dan pemasaran hasil industri agro;
- 3) Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta memperkuat pemasaran hasil industri agro dan melakukan analisa kebutuhan dasar;
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan kerjasama promosi dan memberikan informasi peluang pasar hasil industri agro;
- 5) Pelaksanaan pengawasan mutu dan kondisi pemasaran industri agro;
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi industri agro; dan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Industri Non Agro

Seksi industri non agro mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang industri agro dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan usaha, fasilitasi sarana prasarana pemasaran/promosi terhadap usaha bidang industri non agro untuk meningkatkan kemahiran pekerja melaksanakan produktivitas. Dalam melaksanakan tugas seksi industri non agro menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi industri non agro sesuai dengan program kerja bidang perindustrian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang industri non agro terkait kajian mutu dan pemasaran hasil industri non agro;
- 3) Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta memperkuat pemasaran hasil industri non agro dan melakukan analisa kebutuhan dasar;
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan kerjasama promosi dan memberikan informasi peluang pasar hasil industri non agro;
- 5) Pelaksanaan pengawasan mutu dan kondisi pemasaran industri non agro;
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi industri non agro; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- c. Seksi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan Industri Seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri mempunyai tugas menyelenggarakan program kerja, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan perlindungan jaminan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan program perencanaan bina ketenagakerjaan dan hubungan industri.

Dalam melaksanakan tugas seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri menyelenggarakan fungsi;⁴⁵

⁴⁵ Ibid, h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan program kerja seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri sesuai dengan program kerja bidang perindustrian;
- 2) Pembinaan, pengembangan dan perkuatan kelembagaan industri yang ada untuk menjadi pelaku usaha ekonomi yang maju dan berdaya saing;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi ke sentra unggulan secara berkala;
- 4) Pelaksanaan pengembangan usaha kerja sama antar kelembagaan perusahaan industri dengan kelembagaan pelaku pasar, kelembagaan pelaku suplayer bahan baku, kelembagaan buyer dalam dan luar negeri serta infestir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan pengawasan potensi pencemaran lingkungan hidup dan melakukan rekomendasi untuk pencegahan dan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh limbah industri;
- 6) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri dengan stakeholder terkait;
- 7) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di seksi kerjasama, kelembagaan, pengembangan teknologi dan perlindungan industri; dan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bidang Tenaga Kerja Bidang

Tenaga Kerja dikepalai oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang program pelayanan dan data ketenagakerjaan dalam arti penyusunan rencana dan program pelayanan data sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas bidang tenaga kerja menyelenggarakan fungsi;⁴⁶

- a. Perumusan, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan pelayanan tenaga kerja;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program ketenagakerjaan sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi ketenagakerjaan dan pelayanan
- d. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan
- e. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang ketenagakerjaan sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
- f. Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang ketenagakerjaan

⁴⁶ Ibid, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan koordinasi pelatihan dan penyuluhan ketenagakerjaan dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan bimbingan serta melakukan pelatihan keterampilan bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemahiran pekerja melaksanakan produktivitas tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja
- 2) Pelaksanaan pemantauan, pengukuran produktivitas tingkat kota dan fasilitasi konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
- 3) Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta
- 4) Pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi dalam pengembangan mutu dan produk hasil pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
- 5) Pengumpulan dan mengolah data statistik pengembangan pembinaan latihan lembaga swasta
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Seksi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perencanaan program data serta melakukan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja telah menjalani pelatihan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi

- 1) Penyusunan program kerja seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis/pembinaan dan penyuluhan penempatan tenaga kerja
- 3) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
- 4) Melakukan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga/ perusahaan penempatan tenaga kerja swasta
- 5) Penyebarluasan sebagai promosi terkait persyaratan dan mekanisme bekerja di luar negeri kepada masyarakat
- 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial mempunyai tugas menyelenggarakan program kerja, monitoring dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi, pembinaan dan perlindungan jaminan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan program perencanaan bina ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Dalam melaksanakan tugas seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial menyelenggarakan fungsi

- 1) Penyusunan program kerja seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial sesuai dengan program kerja bidang tenaga kerja
 - 2) Pengumpulan dan pengolahan data statistik pengembangan pembinaan ketenagakerjaan
 - 3) Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan pada perusahaan;
 - 4) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan
 - 5) Pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah
 - 6) Penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan tenaga kerja dan hubungan industrial
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kerajinan Industri

Susunan Organisasi UPTD Kerajinan Industri terdiri dari:⁴⁷

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha

⁴⁷ Ibid, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja. UPTD Kerajinan Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di bidang pengelolaan kerajinan industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, UPTD Kerajinan Industri DPMPTSPPTK menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan pembangunan teknis operasional
- 2) Pengkajian dan analisa teknis operasional
- 3) Pengujian dan persiapan teknologi di lapangan
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang urusan pengelolaan pelayanan dan peminaan kerajinan industry
- 5) Pelaksanaan operaisonal pelayanan kepada masyarakat
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD
- 7) Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang kegiatan
- 8) Pelaksanaan operasional ugas teknis dinas sesuai dengan bidang urusan.

A. Peran

1. Pengertian Peran

Kata peran di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁴⁸ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila diartikan dengan peran perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.⁴⁹ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan Dinas Ketenagakerjaan suatu peran juga terdapat dalam dinas Ketenagakerjaan, yang mana Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja.

⁴⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, h.735

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 212-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Peran

Tujuan peran adalah melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, agar terlaksananya suatu peranan. Tujuan peranan ini bukan di tujukan untuk individunya melainkan ditujukan kepada jabatan atau kedudukan yang di sandang oleh individu tersebut.

B. Hukum Tenagakerja

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Pada awalnya hukum ketenagakerjaan disebut hukum perburuhan, dan sekarang keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun dunia akademik, dimana hukum perburuhan berasal dari kata “*arbeidsercht*”. Kata *arbeidsrecht* sendiri, banyak batasan pengertiannya. Menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri mapupun masyarakat.⁵⁰

Sering terjadi salah kaprah seakan akan yang disebut pekerja / buruh/ karyawan adalah orang orang yang bekerja di pabrik, para cleaning service dan staf staf administrasi di kantor kantor, sedangkan para manager dan kepala kepala bagian, para direktur bukan sebagai pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja

⁵⁰ Lalu Husni, Hukum Ketenagakejaan Indonesia Edisi Revisi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.

Ketenagakerjaan diatur dalam Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, yang diundangkan pada lembaran negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu, pembangunan ketenagakerjaan sebagai integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spritual.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menentukan pengertian istilah ketenagakerjaa sebagai hal yang berhubungan dengan tenagakerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerjaa. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam UU ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal hal sebelum masa kerja, anatara lain : menyangkut pemagangan, kewajiban, mengumumkan lowonga kerja, dan lain lain.

⁵¹ Ibid, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan adalah seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh instansi yang berwenang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Pada waktu sebelum, selama, sesudah. Istilah buruh merupakan peninggalan zaman feodal yang mana orang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang yang melakukan pekerjaan berat dan kotor.⁵²

Banyak rumusan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan diberikan oleh para ahli hukum, maupun pendapat yang satu dan yang lainnya berlainan bunyinya. Rumusan diberikan antara lain dari :

1. Molenaar Hukum perburuhan/*arbeidsrecht* adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain.
2. M.G. Levenbach Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang bersangkutan paut dengan hubungan kerja. Dalam pengertian tersebut hubungan kerja tidak hanya mengatur mereka yang terikat pada hubungan kerja saja,

⁵²

<http://repository.uinbanten.ac.id/3454/6/BAB%20IV%20%26%20BAB%20V.pdf>
diakses tanggal 19 September

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan termasuk juga peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja. Contoh : peraturan untuk magang.

3. Van Esveld Hukum Perburuhan tidak membatasi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan saja, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swa pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.
4. MOK Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandenngan dengan pekerjaan itu.
5. Prof. Iman Soepomo Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Payung hukum utama untuk mengurus urusan ketenagakerjaan di indonesia ialah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ tiap tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan “. Secara umum, pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 28 dan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung utama. Berdasarkan pondasi tersebut msks terbentuklah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Kontrak Ketenagakerjaan

Sebelum terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, dibuat suatu perjanjian yang merupakan dasar kesepakatan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang perjanjian kerja, dan mengatur tentang perjanjian kerja bersama. Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak. Perjanjian kerja bersama termasuk dalam sebuah perjanjian. Di dalam perjanjian minimal ada dua pihak. Pihak di dalam perjanjian adalah subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum.⁵³

Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan akibat hukum suatu kontrak. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pembuat kontrak. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya, kewajiban bagi pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pelaksanaan suatu kontrak harus ditetapkan secara tegas, cermat, serta harus dituangkan dan tercermin dalam isi kontrak.

⁵³ Iman Soepono, 2007. “*Pengantar Hukum Perburuhan*”, (Jakarta:Djambatan), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian. antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. Selain pengertian normatif diatas, Iman Soepomo (53 : 1983) berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPdata, bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “adanya di bawah perintah pihak lain” sehingga tampak hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi). Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum, karena menunjuk hubungan antara pekerja dan pengusaha yang

⁵⁴ Ibid, h.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.⁵⁵

C. Pelatihan Kerja

1. Pengertian Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja mengandung banyak arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelatihan berasal dari kata dasar Latin yang berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu (dapat) melakukan sesuatu.⁵⁶ Kata pelatihan merupakan kata yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang dalam Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih. Adapun istilah pelatihan memiliki beberapa persamaan yang dalam Bahasa Inggris disebut training. Berikut pengertian training menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut Menurut Bernardin dan Russell,

“Training is defined as any attempt to improve employed performance on a currently held job or one related to it. This usually means changes in specific knowledges, skills, attitudes, or behaviors. To be effective, training should involve a learning experience, be a planned organizational activity, and be designed in response to identified needs.”

⁵⁵ Ibid, h. 63

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua, Jakarta : Balai pustaka, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini berarti bahwa pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Cara agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi. Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhart dan Wright, training is a planned effort to facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and behavior by employee.

Hal ini berarti bahwa pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Sedangkan menurut Dessler,⁵⁷ pengertian pelatihan adalah memberikan karyawan baru atau lama suatu keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Dengan demikian pelatihan berarti menunjukkan seorang masinis bagaimana mengoperasikan mesin barunya, bagi seorang juru jual baru, bagaimana menjual produk perusahaannya, atau bagi seorang penyelia (supervisor) baru bagaimana mewawancarai dan menilai karyawan.²⁰ Jadi, definisi pelatihan dari beberapa para ahli dapat disimpulkan setiap upaya yang terencana untuk meningkatkan

⁵⁷ Sandra Dewi, Sri Suwarsi, *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Kewirausahaan Pada PMI Purna*, (Bandung: Majalengka, 2009), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja yang dipekerjakan pada pekerjaan yang saat ini dipegang atau yang terkait dengannya.

Hasil dari pelatihan adalah perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, perubahan pengetahuan yang dimaksud adalah peserta pelatihan awalnya yang tidak mengerti suatu hal menjadi mengerti. Dari yang tidak mengetahui ilmu tentang administrasi perkantoran menjadi mengerti dan faham, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat baik dalam teori maupun praktik pada dunia kerja. Kemudian, untuk perubahan keterampilan dan keahlian adalah peserta yang awalnya hanya memiliki keterampilan yang terbatas, menjadi bisa bahkan ahli dalam keterampilan yang telah diajarkan atau diberikan.⁵⁸

Dan yang terakhir adalah perubahan perilaku yang biasanya memiliki etika dalam bekerja kurang baik, bahkan mengetahui etika dalam bekerja menjadi faham dan mengerti. Dari beberapa hal di atas, agar pelatihan yang diberikan efektif dan efisien harus melibatkan pengalaman belajar, kegiatan - kegiatan organisasi yang direncanakan, dan dirancang untuk menanggapi kebutuhan yang teridentifikasi dan yang dibutuhkan.

2. Manfaat Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan dan di arahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan

⁵⁸ Ibid, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan (pasal 9 Undang Undang No.13 Tahun 2003).

Pasal 11 Undang undang Nomor13 Tahun 2003 menjamin setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minta, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Selanjutnya disebutkan bahwa pengusaha bertanggung jawab ataus peningkatan dan pengembangan kompetensi pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (pasal ayat 3). Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan atau lembaga pelatihan kerja swasta (pasal 13 ayat 1). Pelatihan kerja dpat diselenggarakan di tempat peltihan kerja atau tempat kerja. Lembaga pelatihan kerja pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dalam menyelenggrakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta dengan demikian menjadi tanggung jawab pemerintah maupun swasta untuk menyelenggrakan pelatihan kerja sesuai dengan standar dan kompetensi kerja.⁵⁹

3. Tujuan Pelatihan Kerja

Tujuan pelatihan kerja adalah menemukan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan, dengan aadanya pelatihan kerja ini para pencari kerja dapat menggali lebih dalam kemampuan kemampuan, dan juga mengembangkan keahlian yang mereka

⁵⁹ Lalu Husni, Op. cit.,h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miliki, sehingga peluang dalam mencari pekerjaan akan lebih besar. Dalam pelatihan kerja ini pra pencari kerja akan di ajarkan bagaimana cara meningkatkan hasil produksi dan produktifitasnya. Dan juga tujuannya adalah untuk mengeluarkan sertifikat pelatihan kerja yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam mencari pekerjaan. ⁶⁰

D. Pelatihan Kerja Berdasarkan Undang-undang

Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, termasuk melakukan berbagai pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan atau lembaga pelatihan swasta yang mana pelatihan tersebut di atur dalam Undang Undang.

Menurut pasal 9 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pelatihan kerja kerja diselenggarakan dan diarahlan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. ⁶¹

⁶⁰ Ibid, h. 121

⁶¹ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelatihan kerja yang tetap terlaksana walaupun dalam masa pandemi, Tetap terlaksananya pelatihan kerja selama masa pandemi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan mereka agar dapat bersaing dalam keadaan ekonomi yang sulit karena pandemi. Peserta akan dibantu dengan sertifikat agar lebih cepat mendapatkan pekerjaan dan bantuan modal untuk berusaha.
2. Kendala yang dihadapi oleh dinas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pelatihan kerja ialah terkendala ruangan yang sempit dikarenakan harus menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Sedikitnya peserta pelatihan dikarenakan dibagi menjadi kelompok kelompok kecil menjadi penyebab kurangnya antusias peserta selama pelatihan kerja dilaksanakan.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas ketenagakerjaan memberikan fasilitas tempat yang memadai sesuai dengan protokol covid19, yang mana akan mempermudah pelaksanaan pelatihan kerja
2. Masyarakat harus bisa memanfaatkan pelatihan kerja ini sebagaimana mestinya karena tidak semua peserta pelatihan yang mendaftar mendapat kesempatan untuk melakukan pelatihan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Pebriyan, Anggota Pelatihan Kerja Kewirausahaan Tahun 2020, wawancara tanggal 9 Maret 2021
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Arsip Dokumen Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Terpadu Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi
- Dokumen Nama Peserta Pelatihan Kewirausahaan Dan Tata Boga Tahun 2020
- Dokumen Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2020 dan Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Fera Sukanti, Anggota Pelatihan Kerja Kewirausahaan Tahun 2020, wawancara tanggal 9 Maret 2021
- Gugus wijanarko “perancangan prograam pelatihan karyawan dalam rangka mendukung produktifitas karyawan dimasa pandemi covid 19”, STIAMAK STIE IBMT, Vol. 17 Nomor1 – Oktober 2020
- HB Satopo, 1999, *Medote Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: UN Press
- <https://dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id/> diakses tanggal 1 Maret 2021
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2003,
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2010,
- Miftahul Ilmi, Anggota Pelatihan Kerja Kewirausahaan Tahun 2020, wawancara tanggal 9 Maret 2021
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,
- Nona Widyana, “Program Pelatihan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2015”, JOM FISIP, Vol. 3 Nomor2 – Oktober 2016
- Ridwan Junaedi, Anggota Pelatihan Kerja Kewirausahaan Tahun 2020, wawancara tanggal 9 Maret 2021
- Salman Alfarisi, Anggota Pelatihan Kerja Kewirausahaan Tahun 2020, wawancara tanggal 9 Maret 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Jakarta : Balai pustaka, 1997

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo , 2011,

<http://repository.uinbanten.ac.id/3454/6/BAB%20IV%20%26%20BAB%20V.pdf>
diakses tanggal 19 September



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan**, yang ditulis oleh :

Nama : Annisa Mayuni

NIM : 11720725003

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril S.HI.,M.H.

Sekretaris

Muslim,S.Ag.,S.H.,M.Hum.

Penguji I

H.Mohd. Kastulani, S.H.,M.H.

Penguji II

Hj. Nur'ani Sahu, S.H.,M.H.

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus,S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

y. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Pengutipan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020**, ditulis oleh saudara :

Nama : Annisa Mayuni
NIM : 1720725003
Program Studi : Ilmu Hukum / Konsentrasi HTN

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 24 November 2020
Narasumber : Roni Kurniawan, SH.MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 08 Desember 2020
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Roni Kurniawan, S.H.,M.H.

NIP.130217086

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1812/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANNISA MAYUNI
NIM : 11720725003
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota bukittinggi dalam pelaksanaan pelatihan kerja pada masa pandemi berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 16 tahun 2020 tentang indikator kinerja utama kementerian ketenagakerjaan tahun 2020

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020**, ditulis oleh saudara :

Nama : Annisa Mayuni
NIM : 1720725003
Program Studi : Ilmu Hukum / Konsentrasi HTN

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 24 November 2020
Narasumber : Roni Kurniawan, SH.MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 08 Desember 2020
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Roni Kurniawan, S.H.M.H.

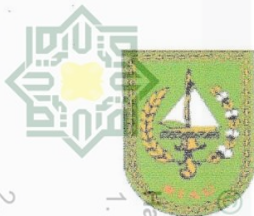
NIP.130217086

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38748
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1812/2021 Tanggal 9 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

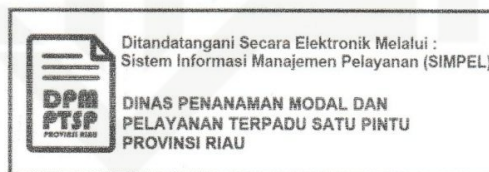
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ANNISA MAYUNI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720725003 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BUKITINGGI DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA PADA MASA PANDEMI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS TENAGAKERJA KOTA BUKITINGGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/181 /KKPol-KB/2021

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- a. Bahwa sesuai surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor 570/325-Periz/DPM&PTSP/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 Perihal Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama : ANNISA MAYUNI
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 3 Juli 1998
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Kasiak Jorong Kambang VII Kelurahan/Desa Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1306144301980001
Judul Penelitian : Peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
2. Balai Latihan Kerja Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 22 Februari s/d 22 Mei 2021
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Pelaksanaan penelitian dengan **Protokol Kesehatan Covid-19** dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 23 Februari 2021
a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kasi Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S.Sos.

NIP. 19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pindu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
5. Kepala Balai Latihan Kerja Kota Bukittinggi
6. Arsip.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ANNISA MAYUNI
NIM : 11720725003
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BUKITTINGGI DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA PADA MASA PANDEMI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Pembimbing: Basir, S.HI, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

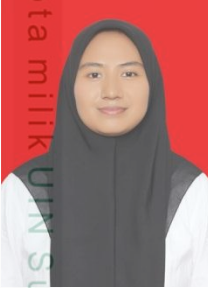
UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ANNISA MAYUNI, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 3 Juli 1998 merupakan anak keenam dari 6 bersaudara, lahir dari pasangan Syafri dan Nilawati. Mengawali pendidikan dasar di SD Negeri 13 Gadut dan selesai pada tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Tilatang Kamang dan selesai pada tahun 2014 dan kembali melanjutkan tingkat SMA di SMA 1 Negeri Tilatang Kamang dan diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata -1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 bulan di Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Kambing 7.

Atas berkat dan rahmat dari Allah dan dukungan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan”** di bawah bimbingan langsung Bapak Basir, S.H., M.H. Berdasarkan Hasil Ujian Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 22 November 2021, penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.